

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesuksesan serta kemajuan agensi atau perusahaan bergantung pada sumber daya manusia sebagai pengontrol dan memainkan peran utama yang sangat penting. Salah satu faktor di dalamnya adalah sumber kekuatan manusia dimana mempunyai suatu nilai serta kemampuannya. Garini (2011) keberadaan kompetitor di lingkungan kerja mengharuskan setiap karyawan, baik swasta maupun negeri untuk dapat bekerja dengan etos kerja yang tepat serta semaksimal mungkin, untuk *survive* sekaligus tumbuh ketika mengoptimalkan dan menggunakan kemampuan dari bidang ilmu pengetahuan mengikuti kekuatan serta kemampuan yang dipunya serta mampu bermanfaat untuk instansi di lingkungan kerja.

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyajikan secara realistis tentang analisis yang dapat mengetahui keadaan di dalam unit kerja dari peneliti bekerja. Fenomena pembentukan lembaga yang mengatur masalah kesehatan bagi masyarakat, yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan di tahun 2014, dimana membahas terkait dengan dana anggaran yang ada di area Puskesmas. Dimana berasal dari anggaran kapitasi asuransi nasional Dana kapitasi dapat diartikan sebagai bentuk dana yang di peroleh dari *cost* / iuran yang di bayarkan oleh BPJS program kesehatan kepada layanan kesehatan di tingkat pertama.

Post of funds merupakan hasil dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional Badan Layanan Umum di Pemerintah Daerah. Fungsi dari *post of funds* Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Agar anggaran

dapat digunakan dan adanya penyerapan secara maksimal. Selanjutnya peneliti memaparkan analisis terkait transparansi laporan keuangan dari penerima yang berhak atas fasilitas kesehatan yang di pilih oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional ,yang mana dana tersebut berasal dari dana Badan Layanan Umum . dapat di artikan bahwa adanya unsur transparan terhadap keuangan yang berasal dari dana tersebut sehingga telah memberikan jalan masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan yang terbuka.

Perolehan anggaran dari Jaminan Kesehatan Nasional sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016. Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Alokasi Dana Kapitasi

Jaspel	Jenis Dana Operasional BLUD			
	Obat	BHP	Alkes	Lain-Lain
50%	20%	10%	4%	16%

Sumber : Panduan penggunaan dana BLUD

Keterangan :

Jaspel : Jasa Pelayanan
 BHP : Biaya Habis Pakai

Berdasarkan adanya informasi pada tabel diatas maka bisa disimpulkan jika dana yang di miliki oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan manfaat sehingga dapat memenuhi keperluan biaya operasional dan biaya peningkatan fasilitas di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Sedangkan untuk menerapkan peraturan dari Undang-Undang Dasar Keuangan Negara, terbentuk sebuah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang memiliki wewenang melakukan penyusunan konsep , untuk perubahan Peraturan Presiden yang *subsider*, tercantum

dalam aturan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dari kedua hal ini, maka diterbitkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan tentang Sistem Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Penjelasan di atas merupakan *indicator* bagaimana kinerja pemerintah agar dapat mempertanggung jawabkan dalam setiap periode cut-off yang diatur sesuai dengan ketentuan isi pasal 30 sampai dengan 32 Undang-Undang No 7 Tahun 2003 mengenai Keuangan Tahunan pemerintah Indonesia.. dapat diambil garis lurus bahwa hal ini beriringan dengan *Manpower* dari *finacial* daerah dalam rangka pelaksanaan otonom regional serta menjalankan system *operational* pemerintahan. Selanjutnya, strategi pembukuan tergantung pada unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari perencanaan dan eksekusi Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD), kutipan Garini (2011).

Sehingga, akan mencapai kesinambungan antara anggaran, rancangan, eksekusi dan detail keuangan tahunan daerah. Permenkes Nomor 19 Tahun 2014 telah menetapkan pengaturan yang diidentifikasi dengan rencana pengeluaran yang diambil dari biaya retribusi Jaminan Kesehatan Nasional. Ini karena adanya jasa pelayanan medis di mana pegawai hanya menerima *salary* per bulan yang di dapatkan dari Otoritas Daerah. Dapat di artikan bahwa ada ketidakadilan dan kemaslahatan yang di rasakan oleh pelayan kesehatan publik terkait bantuan pemerintah yang diberikan. Dengan demikian bisa di analogikan dan di pikirkan dalam perolehan jasa layanan medis dari pegawai sesuai dengan kriteria dan tugas ,apapun yang di perlukan, lebih baik dikombinasikan untuk mencapai keadilan yang setara dan kemakmuran pada alokasi sumber daya sebab, perolehan penghasilan merupakan wujud dari kepemilikan bersama sepantasnya pendistribusiannya sama rata kepada pegawai

Pada dasarnya, diantaranya ada dua jenis yang menjadi sumber pendanaan dari fasilitas kesehatan tingkatan pertama ,yang di dapatkan dari dana kontribusi Jaminan Kesehatan Nasional , antara lain:

1. *Payment System* angsuran dari berasal dari dana yang didapatkan dari jumlah yang sudah teregistrasi dikalikan dengan nominal iuran terakhir senilai Rp.6.000 yang dibayar oleh BPJS Kesehatan lewat rekening bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di setiap fasilitas pelayanan kesehatan tingkatan pertama. Pemanfaatannya merupakan suatu hak fasilitas pelayan kesehatan tingkatan pertama, tetapi berdasarkan pada Peraturan keuangan daerah.
2. *Payment System* non kapitasi ialah sumber dana yang diperoleh dari *cost* Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat untuk tindakan klinis rawat inap tingkat pertama, sebesar Rp. 180.000/pasien, dan persalinan dengan di bantu dokter spesialis kandungan dan bersalin, besaran *cost* yang di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk kasus ini sebesar Rp. 700.000/pasien dalam satu bundle kasus persalinan normal dan perlakuan medis lainnya sesuai ketentuan dari BPJS Kesehatan.

Berdasarkan problem yang dijelaskan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan analisa dengan adanya transparansi dari laporan keuangan pada sektor pembagian jasa medis, dapatkah pembagian jasa layanan medis di sesuaikan dengan golongan, pangkat, serta Jobdisk dan kehadiran Garnita (2008) , Dengan penjelasan bahwa, kerangka ringkasan anggaran saat ini non tunai, sehingga semua aturan bayar yang diperoleh perwakilan akibatnya masuk ke catatan setiap

pekerja memanfaatkan Mandiri Money Stage (ATM) Bank Pemajuan Daerah (BPD) Jawa Timur.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pendayagunaan Dana Kapitasi Asuransi Nasional guna layanan medis dalam dukungan biaya kesehatan dan pengoperasian di sarana dan prasarana kesehatan di Tingkat dasar dapat di lakukan sinkronisasi dengan iklim laporan keuangan yang clear dan terbuka di Puskesmas Taman, mengingat adanya termuan terkait dengan adanya penurunan pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh masing-masing pegawai puskesmas karena harus sesuai dengan yayasan yang disarankan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014, yang mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan yang seringkali tidak sesuai dengan kuantitas dari kinerja pegawai.

Oleh sebab itu terkait dengan masalah yang melatar belakangi nya penulis sangat memiliki ketertarikan guna mengangkat sebuah judul “ANALISA PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAN PENURUNAN INSENTIF JASA MEDIS TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS TAMAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Jika di telaah dari banyaknya penjelasan yang melatarbelakanginya ada beberapa permasalahan yang mampu diungkapkan sebagai berikut :

1. Apakah Laporan Keuangan Yang Telah Di Sajikan Secara Tranparansi Berpengaruh Signifikan Pada Kinerja Pegawai Puskesmas Taman?

2. Apakah Penurunan Hak Kesejahteraan Yang Diberikan Berupa Jasa Layanan Medis Berpengaruh Signifikan Pada Kinerja Pegawai Di Puskesmas Taman?

1.3 Tujuan Penelitian

Ditinjau pada penjelasan yang melatarbelakangi susunan permasalahannya, dengan ini penulis memiliki tujuan guna membuktikan secara empiris bahwa:

1. Melakukan pengujian Dan analisis apakah ada dampak yang signifikan terhadap performance dari pegawai di Puskesmas Taman jika system laporan keuangan di paparkan dengan cara yang terbuka atau tranparan
2. Melakukan pengujian Dan analisis apakah dapat memberikan dampak yang signifikan terkait menurunnya hak kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan kesehatan terhadap Pola Hidup Pegawai Dan performance pelayan kesehatan Di Puskesmas Taman.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu bermanfaat untuk seluruh laporan keuangan yang transparansi dapat memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan kinerja di sektor pelayanan kesehatan khususnya instansi dimana peneliti bekerja dan sebagai bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga akan menimbulkan

suasana kerja yang harmonis dan menghindari adanya peluang kecurangan atau (*fraud*)

1.4.2 Aspek Pengembangan Ilmu dan Pengetahuan

Berdasarkan pada hasil penelitian dimaksudkan agar memberikan penambahan pada pengetahuan system quality dan unsur - unsur yang ada pada laporan finansial bidang kesehatan antara lain Puskesmas Taman, sedangkan bagi pemerintah daerah bermanfaat sebagai penambah informasi serta pengetahuan tentang nilai kualitas dari Finacial Report

1.4.3 Aspek Akademis

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan penelitian di masa yang akan datang.